

ABSTRAK

Nama : Riyan Haqi Khoerul Anwar, NIM : 2200120017, Sejarah Peradaban Islam, Program Magister Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Purwakarta merupakan kawasan Tatar Sunda yang secara resmi menjadi kabupaten sejak tahun 1968. Beberapa bupati silih berganti memimpin kabupaten ini. Dedi Mulyadi merupakan bupati kesepuluh dan menjabat selama dua periode. Ia memiliki pemikiran berbeda dari para bupati yang memerintah sebelumnya. Selain menjadi Bupati, ia juga seorang budayawan yang mencintai dan menerapkan budaya dalam kebijakan pemerintahannya, meliputi sosial, politik, kesehatan, pendidikan dan lainnya. Budaya yang dijadikan acuan adalah budaya Sunda yang merupakan karakter masyarakat Sunda Purwakarta. Pengaruhnya, pembangunan di Kabupaten Purwakarta kembali kepada nilai dasar: tanah, air, udara, dan matahari sebagai basis penciptaan manusia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara historis pandangan Dedi Mulyadi dan organisasi massa Front Pembela Islam dalam melihat budaya Sunda, kebijakan budaya Sunda pada masa kepemimpinan Dedi Mulyadi, dan merekonstruksi historis konflik kebijakan Sunda dengan FPI pada masa itu. Penelitian ini menggunakan tahapan dalam metode penelitian sejarah, meliputi: heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Teori yang digunakan adalah teori konflik Ralf Dahrendorf. Ia berpendapat, bahwa konflik hanya muncul melalui relasi-relasi sosial dan sistem setiap individu atau kelompok. Suatu yang tidak terhubung ke dalam sistem tidak akan mungkin terlibat dalam konflik. Dahrendorf menyebutnya *integrated into a common frame of reference*. Dikatakan pula, bahwa unit analisis dalam sosiologi konflik adalah keterpaksaan yang menciptakan organisasi-organisasi dapat bersama sebagai sistem sosial. Dedi Mulyadi dengan kekuasaannya sebagai Bupati Purwakarta pada saat itu, tidak sedikit menuai konflik atas kebijakan budaya Sunda dan keputusannya yang diterapkan di Purwakarta.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Dedi Mulyadi merupakan Bupati Purwakarta periode 2008-2018 yang membangun Purwakarta dengan spirit budaya, pembangunan berkarakter, yakni sebuah filosofi pembangunan yang didasarkan kepada nilai persenyawaan antara manusia dengan tanah, air, udara, dan dengan matahari. Karena pada hakikatnya dalam aspek material manusia tercipta dari keempat unsur tersebut. (2) Kebudayaan menjadi nilai dasar yang hakiki dalam menetapkan kebijakan pembangunan Purwakarta. (3) FPI merupakan kelompok yang menentang terhadap kebijakan kebudayaan Dedi Mulyadi di Purwakarta. Dari mulai pemberlakuan ucapan *sampurasun*, pemasangan patung pewayangan di sudut kota Purwakarta, festival bebegig, festival egrang, pemasangan janur di jalan pusat kota Purwakarta, dan *ngamumule* Sunda Wiwitan. (4) Kebijakan-kebijakan yang diterapkan Dedi Mulyadi dengan spirit budayanya mengandung makna dan filosofi pembangunan.

Kata Kunci: *Dedi Mulyadi, FPI, Konflik, Spirit Budaya*

ABSTRACT

Name : Riyan Haqi Khoerul Anwar, NIM: 2200120017, History of Islamic Civilization, Postgraduate Magister Program UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Purwakarta is an area of Sunda Tatar which officially became a regency since 1968. Several regents took turns leading this district. Dedi Mulyadi is the tenth regent and served for two terms. He has a different mindset from the regents who ruled before him. Apart from being a regent, he is also a culturalist who loves and applies culture in his government policies, including social, political, health, education and others. The culture used as a reference is Sundanese culture which is the character of the Sundanese people of Purwakarta. In effect, development in Purwakarta Regency returns to the basic values: land, water, air, and sun as the basis for human creation.

This research aims to historically analyze the views of Dedi Mulyadi and the mass organization Islamic Defenders Front in viewing Sundanese culture, Sundanese cultural policies during Dedi Mulyadi's leadership, and reconstruct the historical conflict of Sundanese policies with FPI at that time. This research uses the stages in the historical research method, including: heuristics, criticism, interpretation and historiography. The theory used is Ralf Dahrendorf's conflict theory. He argues that conflict only arises through the social relations and systems of each individual or group. Something that is not connected to the system is unlikely to be involved in conflict. Dahrendorf calls it integrated into a common frame of reference. It is also said that the unit of analysis in the sociology of conflict is the coercion that creates organizations together as a social system. Dedi Mulyadi with his power as Regent of Purwakarta at the time, did not least reap conflicts over Sundanese cultural policies and decisions implemented in Purwakarta.

The research results show: (1) Dedi Mulyadi is the Regent of Purwakarta for the 2008-2018 period who built Purwakarta with the spirit of culture, character development, which is a development philosophy based on the value of the compounds between humans and land, water, air, and the sun. Because in essence in the material aspect humans are created from these four elements. (2) Culture becomes the essential basic value in determining the development policy of Purwakarta. (3) FPI is a group that opposes Dedi Mulyadi's cultural policies in Purwakarta. From the enactment of sampurasun speech, installation of puppet statues in the corner of Purwakarta, bebegig festival, egrang festival, installation of janur on the road downtown Purwakarta, and ngamumule Sunda Wiwitan. (4) The policies implemented by Dedi Mulyadi with his cultural spirit contain the meaning and philosophy of development.

Keywords: Conflict, Cultural Spirit, Dedi Mulyadi, FPI,